



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Aset Rp 18 M Tidak Jelas

■ Babel Cuma Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Ketidaktertiban dalam pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Bangka Belitung membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Babel

tahun anggaran 2016 gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Bahkan, ada aset senilai Rp 18,14 miliar yang tidak diketahui keberadaannya.

Laporan Hasil Pemerik-

saan (LHP) atas LKPD Provinsi Babel tahun anggaran 2016 diserahkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRD provinsi setempat, Kamis (20/7). BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPD tersebut.

Opini WDP itu sama de-

■ Ke halaman 14

news  analysis

Nizwan Zukhri - Pengamat Kebijakan Publik

Seharusnya Didata



PERSOALAN ketidaktertiban aset tidak hanya terjadi di Provinsi saja, melainkan juga di kabupaten/kota. Persoalan ini kan sudah jelas disampaikan BPK. Kenapa tidak mendapatkan opini WTP? Nilai aset yang tidak diketahui ini cukup besar kalau

■ Ke halaman 14

Peringatan Keras

KETUA DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya menilai, Laporan Hasil Pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Babel merupakan sebuah peringatan keras bagi Pemprov setempat.

"Artinya, kita butuh sinergi dan kerja keras agar tidak terulang. Jika ini terulang lagi, artinya

■ Ke halaman 14



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				✓											

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
												✓												

Aset

Sambungan Halaman 13

ngan tahun anggaran 2015. Pengelolaan aset tetap masih menjadi satu di antara sejumlah permasalahan yang kembali muncul dalam pemeriksaan kali ini.

"Ini juga dikecualikan pada tahun 2015, sampai saat ini secara signifikan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK," kata Anggota V BPK RI, Isma Yatun, Kamis (20/7).

Faktor lain yang menyebabkan Pemprov Babel gagal meraih opini WTP adalah akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan belum dapat dinilai kewajarannya.

"Pemerintah provinsi harus memperbaiki penatausahaan aset yang diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota kepada pemprov berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah-red) yang belum tertib," tutur Isma Yatun.

Meski tidak ada kerugian negara dalam LHP atas LKPD

Peringatan

Sambungan Halaman 13

sama saja kita tidak merepons temuan BPK," kata Didit, Kamis (20/7).

Menurutnya, persoalan aset Pemprov Babel yang tidak diketahui keberadaannya itu sempat menjadi perhatian pihaknya dan sudah ditindaklanjuti. Namun, masih terkendala beberapa hal.

"Sudah dikerjakan. Persoalan aset kan tidak hanya satu, keberadaan aset ini

tersebut, ia menegaskan, Pemprov Babel harus tetap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK.

Selain persoalan pengelolaan aset, pemerintah provinsi ini dinilai tidak tertib dalam menyerahkan LKPD kepada pemeriksa. Penyerahannya dilakukan di luar batas waktu yang ditentukan.

Isma Yatun pun berharap, ke depan Pemprov Babel bisa menyampaikan LKPD tepat waktu dan hasilnya lebih baik lagi.

"Saya berharap apa yang akan dilakukan gubernur akan memberikan hasil yang baik, sehingga tahun 2017 ini hasilnya lebih baik," ujarnya.

Bentuk tim investigasi

Sementara, Gubernur Babel Erzaldi Rosman menyatakan telah membentuk tim investigasi untuk menelusuri keberadaan aset Pemprov Babel yang hilang.

Tim tersebut beranggotakan orang-orang yang sudah terbiasa menginvestigasi. Mereka adalah Komisariss Besar (Kombes) Zaidan dari unsur kepolisian, dan mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Norman.

kemana. Kalau misalnya mobil, eks pejabat kita pakai belum dikembalikan ini yang perlu dilacak," ujarnya.

Ke depan, lanjut Didit, DPRD Provinsi Babel harus lebih jeli melakukan pengawasan internal. Pencapaian opini wajar dengan pengecualian (WDP) bukan salah eksekutif semata, melainkan juga faktor pengawasan DPRD.

"Yang disalahkan bukan hanya eksekutif tapi DPRD sebagai pengawasan tidak berjalan. Saya berharap fungsi pengawasan ini harus

"Saya kasih deadline (batas waktu) ke mereka (tim investigasi) satu bulan kerja, laporan ke saya. Kalau memang aset itu ada dimiliki orang, kenapa bisa sampai begitu," kata Erzaldi, kemarin.

Menurutnya, persoalan aset menjadi permasalahan yang krusial. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pemprov Babel dengan cepat terkait permasalahan tersebut. Di antaranya permasalahan kendaraan yang dipinjam oleh anggota DPRD, itu sudah klir alias sudah jelas.

"Selanjutnya, kami menyusun dengan anggota dewan, kita lakukan sesuai aturan," ujar Erzaldi.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, awalnya aset yang tidak diketahui keberadaannya itu bernilai lebih dari Rp 18 miliar. Ia tidak berani langsung menghapus aset yang dimaksud sebelum dilakukan penelusuran.

"Ini aset yang hilang minta dihapuskan saja, kalau hapus ternyata aset itu ada, saya yang salah. Makanya mau diinvestigasi dahulu, biar bisa kita tindak lanjuti. Ini harus klir," katanya. (o2)

dijalankan untuk membantu keinginan pak gubernur untuk WTP (wajar tanpa pengecualian)," tutur mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah tersebut.

Didit juga mengapresiasi langkah Gubernur Erzaldi Rosman yang membentuk tim investigasi untuk menelusuri keberadaan aset yang hilang.

"Artinya, cepat tanggap dan cerdas menanggapi persoalan ini. DPRD akan melaksanakan pembahasan panitia kerja untuk waktu dua bulan ini," katanya. (o2)



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				✓											

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
												✓												

Seharusnya

Sambungan Halaman 13

sampai Rp 18,14 miliar.

Opini BPK ini bisa dijadikan tolok ukur pengelolaan anggaran keuangan suatu provinsi, keberhasilan dalam pembangunan masalah penganggaran, perencanaan pembangunan.

Kalau dalam akuntansi, mungkin aset ini bisa mengalami penyusutan, misalnya

kendaraan. Tapi kalau seperti tanah dan bangunan ini kan bisa saja meningkat jumlahnya, dan mungkin bisa saja lebih.

Aset-aset ini seharusnya sudah diinventarisasi sejak lama, ditelusuri keberadaannya. Temukan dahulu, harus ada penyerahan. Meskipun sudah rusak, harus dikembalikan.

Banyak sekali aset kita yang tidak terawat. Yang jelas, keberadaannya saja tidak terurus. Mungkin saja

aset yang tidak diketahui keberadaannya, misalnya ada mobil dinas yang belum dikembalikan.

Tertib administrasi dalam persoalan aset sangat penting dalam pengelolaan aset daerah, sehingga hal ini perlu komitmen serius dari pemerintah setempat. Menelusuri, menginventarisasi, dan melaporkan adalah hal yang harus dilakukan agar bisa tertib aset. (o2)



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				✓											

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				/								✓											



BANGKA POS: KRISYANIDAYATI

MENYERAHKAN LHP LKPD - Anggota V BPK RI Isma Yatun menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Babel tahun anggaran 2016 kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Kamis (20/7).